

Strategies to Improve Minimum Service Standards (SPM) in Education Sector Based on Education Report Data

Strategi Peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan berbasis Data Rapor Pendidikan

Joko Setiyono¹⁾, Munir²⁾, Dedy Achmad Kurniady³⁾, Taufani Chusnul Kurniatun⁴⁾, Sumiati⁵⁾

^{1,2,3,4}Universitas Pendidikan Indonesia

⁵Universitas Galuh

E-mail: jokosetiyono@upi.edu¹

Abstract

Community service activities in the form of a seminar on strategies to improve Minimum Service Standards (SPM) based on the Education report have the aim of ensuring that participants (teachers) can understand the Minimum Service Standards of Education and the SPM Index, the obligation to fulfill SPM through budget prioritization, and planning based on education report card data in fulfilling SPM. The participants who attended were approximately 480 people consisting of 25 supervisors, 30 elementary school teachers, and 25 junior high school teachers who attended offline. In addition, around 400 people via zoom meeting consisted of elementary and junior high school teachers in Majalengka district. The implementation of this training went well and the enthusiasm of the participants was quite high. The recommendation for the future is that follow-up is needed in the form of more specific workshops and more in-depth mentoring. The results of this activity were that seminar participants consisting of teachers in the Majalengka district Education Office were able to understand the Minimum Service Standards and their fulfillment through Education Report Data-Based Planning.

Keywords: *strategy, minimum service standards, education report*

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa seminar strategi meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Rapor Pendidikan memiliki tujuan yaitu agar peserta (para guru) dapat memahami Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Indeks SPM, kewajiban pemenuhan SPM melalui prioritas anggaran, dan perencanaan berbasis data rapor pendidikan dalam pemenuhan SPM. Adapun peserta yang hadir sebanyak kurang lebih 480 orang yang terdiri dari pengawas sebanyak 25 orang, guru jenjang SD sebanyak 30 orang, dan guru jenjang SMP sebanyak 25 yang hadir secara tatap muka. Selain itu, sekitar 400 orang via zoom meeting terdiri dari guru SD dan SMP di lingkungan Kabupaten Majalengka. Pelaksanaan pelatihan ini berjalan dengan baik dan antusias peserta yang cukup besar. Rekomendasi kedepan adalah perlu tindak lanjut dalam bentuk workshop yang lebih spesifik dan pendampingan yang lebih mendalam. Hasil dari kegiatan ini peserta seminar yang terdiri dari para guru di lingkungan dinas pendidikan kabupaten Majalengka dapat memahami Standar Pelayanan Minimal dan pemenuhannya melalui Perencanaan Berbasis Data rapor Pendidikan.

Kata kunci: *strategi, standar pelayanan minimal, rapor pendidikan*

1. PENDAHULUAN

Upaya dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan baik pada jenjang Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah sudah dilaksanakan. Namun, permasalahan terkait hasil pendidikan mengisyaratkan perlu adanya pembaharuan strategi peningkatan layanan minimal pada satuan pendidikan. Data menunjukkan bahwa penduduk Majalengka, rata-rata pendidikannya hanya kelas 7 SMP. Selain itu, usia diatas 35 tahun, dengan Pendidikan rendah maka akan sulit mencari peluang kerja. Tujuan penerapan SPM dimaksudkan untuk memastikan bahwa di setiap satuan

pendidikan terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang optimal (Sabdaningtyas, 2018).

Dewi (2019) menyatakan bahwa Perlu adanya pengawasan secara keseluruhan setiap bulan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau Dinas Pendidikan dan Pemerintah perlu melakukan sosialisasi atau pendampingan khusus dalam pemenuhan SPM Pendidikan Dasar setelah hasil sensus pemenuhan SPM Pendidikan diketahui, sehingga sekolah lebih siap dalam perencanaan anggaran untuk meningkatkan SPM Pendidikan.

Dengan berkembangnya zaman yang menghadirkan berbagai perubahan di berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan (Sumiati et. Al, 2024). Tantangan dalam memenuhi SPM sering kali muncul akibat ketimpangan mutu pendidikan, distribusi sumber daya, dan kurang optimalnya perencanaan berbasis data. Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan berbasis data menjadi solusi strategis yang relevan. Salah satu alat penting yang dapat dimanfaatkan adalah Rapor Pendidikan, yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Rapor Pendidikan menyajikan data komprehensif mengenai capaian pembelajaran, kualitas layanan, serta kesenjangan dalam penyelenggaraan pendidikan.

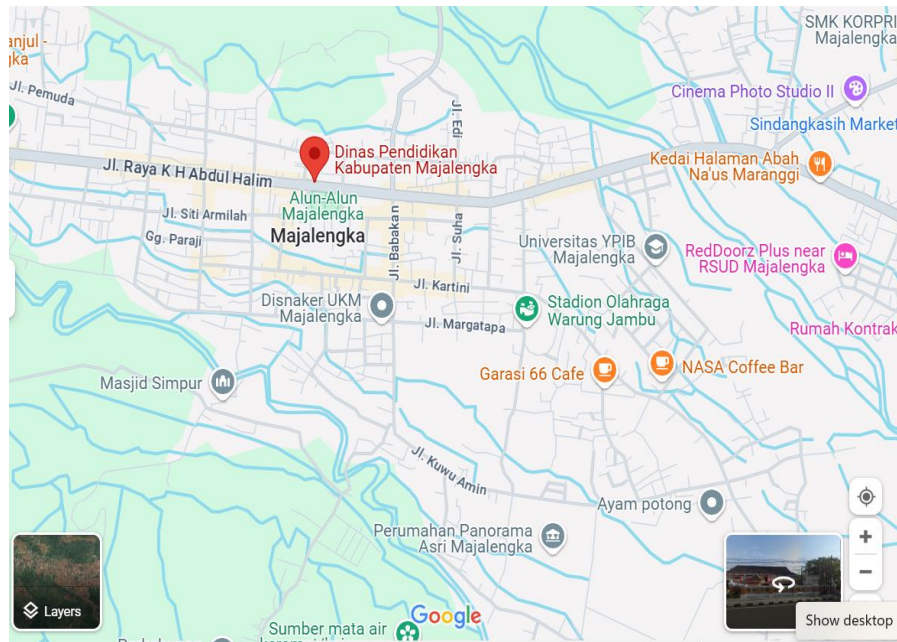
kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana strategi peningkatan SPM yang tepat dan dapat diimplementasikan sangat diperlukan. Peningkatan SPM berbasis rapor pendidikan merupakan strategi untuk memastikan pemerintah daerah dapat secara efektif meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang diamanatkan oleh peraturan. Pendekatan berbasis rapor pendidikan memanfaatkan data dan analisis dari *Rapor Pendidikan* untuk merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan SPM secara lebih terarah dan berbasis bukti sehingga memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk merencanakan intervensi yang lebih efisien dan terukur

2. METODE

Metode yang diterapkan pada kegiatan pengabdian bagi masyarakat adalah seminar yang bersifat hybrid karena dilakukan dengan tatap muka dengan beberapa peserta dan zoom meeting dengan peserta lainnya. mengenai strategi peningkatan SPM bidang pendidikan berbasis Data Rapor Pendidikan terdiri dari beberapa tahapan yaitu Persiapan berupa pembuatan materi yang akan disampaikan saat melaksanakan kegiatan. dan konsolidasi dengan mitra pengabdian yang terkait dengan tempat dan peserta seminar. Pelaksanaan Kegiatan seminar Strategi Peningkatan SPM Bidang Pendidikan berbasis Data Rapor Pendidikan Metode yang dilakukan dalam seminar ini adalah ceramah, dan tanya jawab termasuk diskusi interaktif dengan para peserta. Seminar dilaksanakan sekitar 3 jam yang terdiri dari pembukaan, menyanyikan Indonesia Raya, pemaparan materi, tanya jawab, *closing statement*, menyanyikan lagu Padamu Negeri dan Penutup. Dalam sesi diskusi kami mengupayakan sesi yang dilakukan dengan metode komunikasi dua arah dengan dimaksudkan agar peserta yaitu para guru di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Majalengka dapat memahami serta berpotensi untuk mengimplementasikan bahasan yang disampaikan pematiri. Kemudian dilanjutkan dengan Pelaporan kegiatan dan evaluasi terhadap acara yang sudah dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk seminar dengan sasaran kegiatan adalah Pengawas sebanyak 25 orang, Guru jenjang SD sebanyak 30 orang, Guru jenjang SMP sebanyak 25 yang hadir secara tatap muka. Selain itu, sekitar 400 orang via zoom meeting terdiri dari guru SD dan SMP di lingkungan Kabupaten Majalengka .



Gambar 1. Map Lokasi Kegiatan

Diawali dengan Pembukaan oleh Pembawa acara dan moderator yaitu Nining Dwipujaningsih. Selanjutnya sambutan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Majalengka Dr. Lilis Yuliasih, M. Pd. Dalam sambutannya Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Majalengka menyampaikan terimakasih kepada pemateri yang telah bersedia untuk memberikan pemaparan mengenai strategi peningkatan SPM bidang pendidikan berbasis Data Rapor Pendidikan . Ia juga berharap agar peserta bisa mengikuti kegiatan ini dgn baik agar mendapatkan pengetahuan dan wawasan yg berguna bagi satuan pendidikan masing-masing, dan harapan yang disampaikan adalah acara ini adalah pematik agar para peserta dapat mengaplikasikan strategi yang disampaikan secara berkelanjutan dan bertahap. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Joko Setiyono, M. Kom. Pemaparan materi dengan menggunakan media power point dan video ilustrasi startegi yang perlu diterapkan. Selanjutnya diskusi dan pendalaman materi yang dibuka sebanyak 2 sesi, dan masing masing terdiri dari 3 pertanyaan baik dari peserta offline maupun online. Acara ditutup oleh doa dan closing statement dari moderator.



Gambar 1 pemaparan dari pemateri

Strategi Peningkatan SPM Bidang Pendidikan berbasis Data Rapor Pendidikan

Konsep Standar pelayanan minima (SNP) ditujukan salah satunya untuk meningkatkan pemanfaatan yang efisien atas sumber daya dalam sektor pendidikan. Selain itu, pengenalan SPM akan memberi kontribusi dalam memastikan bahwa alokasi anggaran yang meningkat digunakan dengan cara yang paling efektif untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran (Damanik, 2017). Menurut Suryana dan Safitri (2020), penerapan SPM mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar di daerah dengan intervensi yang terencana, meskipun implementasinya masih terkendala pada daerah dengan sumber daya terbatas. Sedangkan menurut Vitri, Kusumawiranti, & Suwarjo (2019) Standar Pelayanan Minimal disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintahan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. Selain itu, SPM bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan dan memperkuat akuntabilitas yaitu mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan pendidikan.

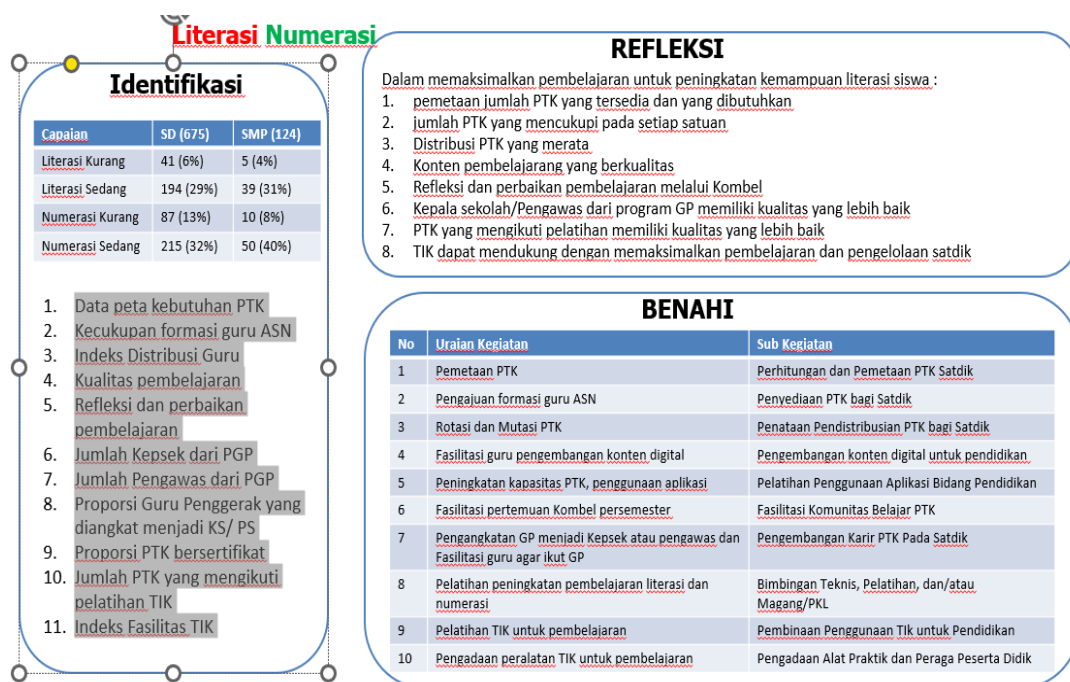
Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menunjukkan bahwa perlunya peran pemerintah daerah dalam memastikan bahwa layanan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kementerian terkait. dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan yang merupakan memperbarui dan menyempurnakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. SNP mencakup standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian pendidikan.

SPM dalam pendidikan berfungsi sebagai tolok ukur minimum layanan pendidikan yang harus disediakan, sementara Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang diatur melalui Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022, berfokus pada peningkatan mutu pendidikan yang lebih komprehensif. Keduanya saling melengkapi, di mana pemenuhan SPM menjadi langkah awal untuk mendukung implementasi SNP. Anwar et al. (2021) melaporkan bahwa daerah yang berhasil memenuhi SPM cenderung memiliki pencapaian SNP yang lebih tinggi. Hal ini karena indikator SPM seperti jumlah guru berkualifikasi, ketersediaan fasilitas, dan tingkat partisipasi siswa menjadi fondasi untuk memenuhi SNP.

Fokus standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan yang lebih kepada hasil belajar siswa di tahun 2021 dibandingkan 2018. Standar Pelayanan Minimal tahun 2018 berfokus kepada partisipasi, ketersediaan dan kualitas barang/ jasa, ketersediaan dan kualitas pendidik. Misalnya indikator Partisipasi siswa, kepemilikan sertifikat pendidik, perlengkapan dasar (buku, modul, dan lainnya) sedangkan Standar Pelayanan Minimal tahun 2021 berfokus kepada kualitas pembelajaran, kualitas lingkungan sekolah, partisipasi, dan kualitas pendidik misalnya indikator: Literasi, Numerasi, iklim keamanan, kebinekaan, inklusivitas.

Menurut Supriyadi (2022), optimalisasi perencanaan berbasis data dapat membantu daerah mengatasi keterbatasan dan meningkatkan capaian indikator SPM. Oleh karena itu, Terdapat 3 langkah sederhana dalam perencanaan berbasis data, yaitu

1. Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan indikator prioritas SPM yang ditampilkan di dalam Rapor Pendidikan.
2. Melakukan refleksi capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan daerah masing-masing untuk menemukan akar masalah.
3. Melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (BOSP) dan daerah (APBD) untuk menyelesaikan akar masalah.



Gambar 2 Contoh implementasi startegi peningkatan SPM berbasis rapor pendidikan

Adapun Strategi Peningkatan SPM yang perlu dilaksanakan dinas pendidikan Kabupaten Majalengka yang tentunya dilaksanakan bersama kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan masing-masing yaitu pembentukan POKJA yaitu tim yang bertugas merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan peningkatan SPM, support Anggaran untuk setiap kelompok kerja (Bimtek), penetapan target dan evaluasi setiap 3 bulan, setiap sekolah menyelenggarakan bimtek dari Anggaran BOS. Adapun anggaran 2024 untuk Literasi dan Numerasi hendaknya diprioritaskan untuk beberapa program yaitu Evaluasi Capaian Raport Pendidikan, Aksi Nyata PMM, Digitalisasi Sekolah, PBD dan Pelatihan TIK. Tindak lanjut seperti palatihan atau workshop yang lebih mendalam diperlukan para guru di masa yang akan datang (Mulyaniapi, et al, 2023)



Gambar 3. Foto hasil kegiatan (pesertaoffline)

4. KESIMPULAN

Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan di dinas pendidikan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Tujuan kegiatan pengabdian ini tercapai dengan maksimal yaitu para guru dapat memahami Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Indeks SPM, Kewajiban pemenuhan SPM melalui prioritasi anggaran, dan Perencanaan Berbasis

Data rapor pendidikan dalam pemenuhan SPM. Adapun rekomendasi untuk tindak lanjut adalah pelaksanaan program prioritas dinas pendidikan Kabupaten Majalengka terutama kegiatan yang lebih komprehensif, mendalam, dan terukur demi adanya peningkatan standar pelayanan minimal (SPM) yang berkelanjutan dan berdampak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R., et al. (2021). *Pengaruh Pemenuhan SPM terhadap Standar Nasional Pendidikan di Daerah*. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan, 10(2), 34-48.
- Dewi, A. O. (2019). Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sleman Tahun 2018. *Hanata Widya*, 8(4), 39-50.
- Damanik, J. (2017). Keterkaitan standar pelayanan minimal (spm) dengan standar nasional pendidikan (snp). *Jurnal dinamika pendidikan*, 10(2), 180-203.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Mardhiyah, R. H., Aldriani, S. N. F., Chitta, F., & Zulfikar, M. R. (2021). Pentingnya keterampilan belajar di abad 21 sebagai tuntutan dalam pengembangan sumber daya manusia. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 12(1), 29-40.
- Mulyaniapi, T., Permana, J., & Nurdin, D. (2023). Increasing Organizational Capabilities of PAUD Units Through the Digital Leadership Seminar. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(5), 1438-1445.
- Rachman, B. A., Firdaus, F. S., Mufidah, N. L., Sadiyah, H., & Sari, I. N. (2021). Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik melalui program kampus mengajar angkatan 2. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1535-1541.
- Sabdaningtyas, L. (2018). Model evaluasi implementasi kebijakan standar pelayanan minimal pada satuan pendidikan jenjang SD. *jurnal penelitian dan evaluasi pendidikan*, 22(1), 70-82.
- Sumiati, S., Komariah, A., Kurniady, D. A., Suryana, A., & Amin, A. (2024). Strengthening School-Family Partnerships Through Seminars on the Detection of Children's Characteristics, Potential and Talents. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 570-573.
- Supriyadi, B. (2022). *Optimalisasi Rapor Pendidikan dalam Peningkatan SPM Pendidikan*. Jakarta: Pusat Kajian Kebijakan Pendidikan.
- Suryana, T., & Safitri, D. (2020). *Implementasi SPM dalam Pendidikan Dasar di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Kebijakan Publik, 12(3), 45-56.
- Vitri, O., Kusumawiranti, R., & Suwarjo, S. (2019). Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. *POPULIKA*, 7(1), 22-33.